



RENCANA  
KERJA  
PERUBAHAN  
TAHUN 2023

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
PEMERINTAH KOTA DEPOK

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang disusun merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan tujuan pembangunan sesuai dengan diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kota Depok.

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, analisis hasil pengendalian dan pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran di masing-masing bidang di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Demikian, semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Depok, Juli 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA DEPOK**



**DEDE HIDAYAT, SE, M.Si**  
**NIP. 19730319 200212 1 006**

## Daftar isi

Hal

<b>KATA PENGANTAR .....</b>		2
<b>DAFTAR ISI .....</b>		3
<b>DAFTAR TABEL .....</b>		4
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	5
	1.1. Latar Belakang .....	5
	1.2. Landasan Hukum .....	6
	1.3. Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	
	1.4. Maksud dan Tujuan .....	
	1.5. Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023</b>	10
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaiannya .....	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	20
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro. ....	22
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	28
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	28
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	33
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	38

**DAFTAR TABEL.****Hal**

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Pencapaian Renstra Dinas 2021 s/d Tahun 2026.....	16
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.....	21
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023.....	24
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Hasil Musrenbang Tahun 2022 Kota Depok.....	27
Tabel 3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD tahun 2023 dan Perkiraan Maju tahun 2024.....	34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, memuat arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2023 yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Depok dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2026 yang hendak dicapai yaitu: “Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera”

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2021–2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Perubahan Renja PD

Pada tahap ini disusun rancangan keputusan Kepala PD tentang pembentukan tim penyusun Renja PD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renja PD kemudian disusun agenda kerja tim penyusun Renja PD sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD serta mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD

Pada tahap ini dirumuskan substansi rancangan Perubahan Renja PD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya rumusan substansi tersebut dituangkan dalam sistematika dokumen rancangan Renja PD.

3. Penetapan Perubahan Renja PD

Penetapan rancangan akhir Perubahan Renja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja PD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD serta Rancangan Awal Renja
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD
3. Penyusunan Perubahan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD

4. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, dan total kebutuhan dana.

Keterkaitan Perubahan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Perubahan Renja PD merupakan penjabaran dan terdapat hubungan keselarasan dengan dokumen yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD Renstra PD dan RPJMD, serta bagi RKA, KUA PPAS dan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 disusunberlandaskan :

- a. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
- e. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
- f. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan – Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keyangan Daerah;

- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
- r. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032;
- s. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026;
- t. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- u. Peraturan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- v. Peraturan Walikota Depok Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- w. Surat Edaran Walikota Depok Nomor 050/13-Bappeda Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023

### **1.3 Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023**

Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta selaras dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023. Terdapat 3 (tiga) hal yang mendasari dilakukannya perubahan Renja Tahun 2023 yaitu upaya untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengendalian dan pelaksanaan kinerja PD serta melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



## **1.4 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tahunan yang dituangkan melalui dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah

1. Sebagai landasan operasional dalam menyelenggarakan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama Tahun 2023.

## **1.5 Sistematika**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD. Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### **1.3 Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Memuat penjelasan tentang alasan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaiannya**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, mengacu pada APBD tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NPSK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Rencana Kerja dan Pendanaan, berisikan penjelasan mengenai**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta penjelasan pendanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan

rancangan RKPD.

## **BAB V PENUTUP**

**Berisikan uraian penutup**, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaiannya

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok melaksanakan 8 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 33.462.304.424 (Tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan hasil evaluasi telaahan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, jumlah anggaran sebesar Rp 9.742.688.742,- realisasi sebesar Rp. 4.114.288.797,- atau 42,23% , Target Kinerja 100%
2. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, jumlah anggaran sebesar Rp. 49.999.800,- realisasi sebesar Rp 0,- atau 0% , Target Kinerja 100%
3. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**, jumlah anggaran sebesar Rp 443.312.500,- realisasi sebesar Rp 259.511.900,- atau 58,54%, Target Kinerja 100%
4. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**, jumlah anggaran sebesar Rp 236.836.600,- realisasi sebesar Rp 135.811.250,- atau 57,34%, Target Kinerja 100%
5. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**, jumlah anggaran sebesar Rp 496.543.650,- realisasi sebesar Rp 348.989.990,- atau 70,28%, Target Kinerja 49,09%
6. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**, jumlah anggaran sebesar Rp 1.761.339.000,- realisasi sebesar Rp 550.578.400,- atau 31,26%, Target Kinerja 100%
7. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**, jumlah anggaran sebesar Rp 11.542.957.950,- realisasi sebesar Rp 1.353.395.322,- atau 11,72%, Target Kinerja 2100 Unit Usaha
8. **Program Pengembangan UMKM**, jumlah anggaran sebesar Rp 9.188.626.200,- realisasi sebesar Rp 451.163.532,- atau 4,91%, Target Kinerja 2100 Unit Usaha

No	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	I		II		12=8+9+10+11		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		
1		2	3	4		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						K	Rp	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda;	%	100	8,611,890,876	100	10,255,966,594	19.91	1,595,486,861	22.10	2,518,803,236	42.01	4,114,290,097	100	42,486,800	100%	7.51%	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	%	100	128,842,700	100	97,525,000	23.81	69,350,000	14.29	12,134,000	38.10	81,484,000	38%	81,484,000	38%	12.25%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	88,842,700	2	52,527,500	1	38,530,000	0	8,284,000	1.00	46,814,000	1	46,814,000	8.33%	11.28%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Laporan	17	40,000,000	19	44,998,000	4	30,820,000	3	3,850,000	7.00	34,670,000	7	34,670,000	7.37%	13.87%	
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	%	100	7,011,784,176	100	8,429,948,094	25	1,331,208,859	25	2,160,437,698	50	3,491,646,557	50	3,491,646,557	200.00%	7.46%	
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	34	7,011,784,176	34	8,429,948,094	34	1,331,208,859	34	2,160,437,698	68.00	3,491,646,557	68	3,491,646,557	200.00%	7.46%	
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	%	100	949,206,900	100	1,121,345,000	7.03	77,954,380	19.22	215,545,206	26.25	293,499,586	26	293,499,586	103.00%	99.14%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	18	24,925,800	1	18,165,000	0.00	-	-	-	0.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	41	156,894,000	5	425,272,000	0	980,000	1	54,605,500	1.00	55,585,500	1	55,585,500	20.00%	6.74%	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	25	44,504,800	1	50,000	0.00	-	1	17,007,500	1.00	17,007,500	1	17,007,500	100.00%	6.18%	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	214,472,000	2	206,442,000	2	23,768,000	2	41,243,000	2.00	65,011,000	2	65,011,000	13.33%	5.31%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	22	135,359,500	1	124,385,000	0.00	-	1	42,995,000	1.00	42,995,000	1	42,995,000	4.55%	5.21%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	253	373,050,800	453	297,081,000	57	53,206,380	64	59,694,206	121.00	112,900,586	121	112,900,586	9.57%	5.58%	
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	%	100	349,396,800	100	414,642,000	25.00	82,077,222	25.00	108,365,376	50.00	190,442,598	50	190,442,598	50.00%	8.28%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	107,600,000	6	137,770,000	2	21,337,062	2	28,825,216	4.00	50,162,278	4	50,162,278	133.33%	6.27%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	6	241,796,800	6	276,872,000	4	60,740,160	2	79,540,160	6.00	140,280,320	6	140,280,320	100.00%	9.35%	

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	%	100	172,660,300	100	192,506,000	18.70	34,895,100	27.00	22,320,956	45.70	57,216,056	45.70	29,742,256	100.0%	29.72%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	10	70,900,000	10	101,960,000	2	19,091,100	2	10,651,156	4.00	29,742,256	4	29,742,256	40.00%	4.96%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	6	46,310,300	11	40,546,000	7	15,804,000	7	11,669,800	7.00	27,473,800	7	27,473,800	116.67%	6.54%
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	55,450,000	1	50,000,000	0.00	-	0	-	0.00	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro		<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Usaha simpan pinjam</b>	%	63.34	50,000,000	73.48	49,999,800	0.00	-			0.00					
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan IUSP (Izin Usaha Simpan Pinjam)	%	100	50,000,000	100	49,999,800	0.00	-			0.00					
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	%	100	50,000,000	100	49,999,800	0.00	-	0	-	0.00					
			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</b>	%	47.27%	394,908,300	56.36	443,312,500	0.31	68,409,740		191,102,160	0.31	259,511,900	31.40%	259,511,900	0.37%	8.65%
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	100%	394,908,300	100%	443,312,500	0.31	68,409,740	75.76	191,102,160	76.07	259,511,900	7607.15%	259,511,900	7607.15%	8.65%
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	165	320,837,000	165	349,874,500	60	68,409,740	65	141,102,160	125	209,511,900	125	209,511,900	75.76%	9.21%
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	78	74,071,300	165	93,438,000	0.00	-	125	50,000,000	125.00	5000000000%	125	50,000,000	75.76%	6.90%
			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP</b>	<b>Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi KSP USP</b>	%	21.21%	198,999,700	25	236,836,600	0.00	20,828,040		114,983,210	0.00	135,811,250	0.00%	135,811,250	#VALUE!	10.86%

			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi KSP USP	%	100	198,999,700	100	236,836,600	0.00	20,828,040	86.96	114,983,210	86.96	135,811,250	86.96	135,811,250	86.96%	10.86%
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit Usaha	110	174,999,700	115	196,739,600	0.00	20,828,040	110	114,983,210	110	135,811,250	110	135,811,250	84.62%	12.07%
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	Unit Usaha	5	24,000,000	5	40,097,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase koperasi yang dilatih	%	60.61%	659,999,700	75.76	496,544,000	21.21	111,912,790	54.55	237,077,200	75.76	348,989,990	75.76%	348,989,990	75.76%	9.83%
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi	%	32.12%	659,999,700	49.09	496,544,000	21.21	111,912,790	43.18	237,077,200	64.39	348,989,990	64	348,989,990	64.39%	9.83%
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang		659,999,700	1,875	496,544,000	35	111,912,790	1,238	237,077,200	1,273.00	348,989,990	1,273	348,989,990	46.29%	9.83%
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi modern	%	6.06%	1,700,969,500	6.06	1,761,339,000	0.00	111,929,440	6.06	550,578,400	6.06	662,507,840	606.06%	662,507,840	4000.00%	4.65%
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	%	100%	1,700,969,500	100	1,761,339,000	0.00	111,929,440	30.30	550,578,400	30.30	662,507,840	30.30	662,507,840	30.30%	4.65%
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		1,700,969,500	165	1,761,339,000	0	111,929,440	50	550,578,400	50.00	662,507,840	50.00	662,507,840	30.30%	4.65%
						165													
						50													
						20													
						50													
						100													
						40													
						3													
						1													

			PROGRAM PEMEBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha baru	%	48,48	5,544,087,700	76.22	11,543,207,950	0.00	129,196,300	57.25	1,224,199,022	57.25	1,353,395,322	57.25	1,353,395,322	5725.23%	2.70%
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Jumlah Wirausaha Baru dan Pengusaha Perempuan	%	100	1,174,087,700	2,100	11,543,207,950	0.00	129,196,300	31.14	1,224,199,022	31.14	1,353,395,322	31.14	1,353,395,322	31.14%	2.70%
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha	2	449,087,700	320	479,575,000	0.00	-		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	225	200,000,000	225	116,744,000	0.00	-		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	300	450,000,000	300	4,995,495,000	0.00	-		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	2,400	75,000,000	2,100	10,320,902,950	0.00	-	654	1,224,199,022	654.00	1,224,199,022	654	1,224,199,022	7.15%	3.19%
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dan pemberdayaan usaha mikro	Orang	500	200,000,000	275	130,491,000	300.00	129,196,300	0	-	300.00	129,196,300	300	129,196,300	60.00%	7.14%
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro binaan yang naik omzet	%	6.67%	6,365,999,796.00	11.29	9,188,626,200.00	0.00	92,205,798	0	358,957,734	0.00	451,163,532	0.00	451,163,532	0.00%	1.36%
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM yang terbina	%	20.00	6,365,999,796	20	9,188,626,200	0.00	92,205,798	-	358,957,734	0	451,163,532	0	451,163,532	0.00%	1.36%
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Unit Usaha	2100	6,365,999,796	1,000	9,188,626,200	0	92,205,798	0	358,957,734	0.00	451,163,532	0	451,163,532	0.00%	1.36%
				1050															
				8															
			Jumlah Anggaran				23,526,855,572				2,129,968,969		5,195,700,962	31.14%	7,325,669,931				



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomer 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, disebutkan bahwa DKUM mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota. Dalam melaksanakan tugas, DKUM menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada Tahun Anggaran 2023 mempunyai 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran, sebagaimana berikut:

Tujuan :

1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan
2. Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing

Tujuan pertama didukung oleh 1 (satu) indikator, yaitu Nilai SAKIP. Tujuan kedua didukung oleh persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan UMKM.

Capaian atau realisasi kedua indikator tujuan tersebut sampai dengan triwulan 2 (dua) Tahun 2023 belum dapat diukur, mengingat bahwa saat ini nilai SAKIP masih dalam proses evaluasi Inspektorat Daerah Kota Depok, sedangkan untuk persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan UMKM baru dapat diketahui pada triwulan 4 (empat).

Sasaran Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro

Sasaran strategis pertama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dengan indikator nilai evaluasi SAKIP dengan formula indikator penilaian inspektorat daerah/ Menpan RB.

Sasaran strategis kedua Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator sasaran adalah koperasi berkualitas dan persentase wirausaha dengan formula indikator sebagai berikut :

Koperasi berkualitas =  $(\text{Jumlah koperasi berkualitas} / \text{total jumlah koperasi}) \times 100\%$

Persentase wirausaha =  $(\text{Jumlah usia penduduk produktif Kota Depok yang berwirausaha} / \text{total jumlah usia})$

produktif Kota Depok) x 100%.



## 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebagai organisasi perangkat daerah dan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah, harus peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik lokal, regional, maupun nasional. Pembangunan perekonomian diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh kota dan masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan perekonomian menjadi lebih tepat sasaran dan dilakukan secara lebih responsive, kreatif dan inovatif. Selain itu juga kemampuan memanfaatkan peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan pembangunan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKUM Kota Depok adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi DKUM Kota Depok dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi DKUM Kota Depok diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DKUM Kota Depok di masa lima tahun mendatang.

Adapun yang menjadi isu-isu penting pada DKUM Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Program Janji Wali Kota dan Wakil Walikota 5000 Wirausaha Baru/ Start Up dan 1000 Perempuan Pengusaha yang akan dimulai di tahun 2022 .
2. Memulihkan kondisi UMKM setelah pandemic Covid-19. Selama masa pandemic Covid-19 ini usaha mikro dihadapkan pada permasalahan penurunan penjualan, sulitnya mendapatkan bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat. (Sumber: BPS, Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha).
3. Teknologi digital terhadap koperasi dan usaha mikro. Selama masa pandemic Covid-19 terjadi perubahan perilaku belanja online yang terus meningkat tapi tidak diikuti dengan kesiapan pelaku UMKM terhadap teknologi digital untuk pemasaran produknya, banyak UMKM yang belum memiliki infrastruktur dasar untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital. Serta kendala penggunaan teknologi digital dan internet untuk memasarkan produknya.

## 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

## Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2023

## Kota Depok

## Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>										
	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>					<b>34,586,549,691</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>			<b>34,398,850,644</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda</b>	<b>100%</b>	<b>10,868,549,691</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda</b>	<b>100%</b>	<b>10,873,291,594</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>120,000,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>117,684,500</b>		
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	73,340,500		
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	45,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	44,344,000		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>persentase adm keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>8,429,948,094</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase adm keuangann tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>8,429,948,094</b>		
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 pegawai	8,429,948,094	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 pegawai	8,429,948,094		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>persentase penyediaan adm umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,663,601,597</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyediaan adm umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,661,255,000</b>		
4)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 jenis	29,879,000		
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	813,601,597	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	43 jenis	812,331,000		
6)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	50,000,000		
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	230,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Makanan dan Minuman	3 jenis	229,842,000		

8)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket	150,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	22 jenis	149,435,000	
9)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354 laporan	390,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	253 OH	389,768,000.00	
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>415,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>424,642,000</b>	
10)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	140,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa	3 jenis	147,770,000	
11)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	275,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai	6 orang	276,872,000	
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase barang milik daerah kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>240,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase barang milik daerah kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>239,762,000</b>	
12)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	101,960,000	
13)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	65,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	59,002,000	
14)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	75,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	78,800,000	
II	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Presentase Penerbitan Izin Usaha simpan pinjam</b>	<b>73%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Presentase Penerbitan Izin Usaha simpan pinjam</b>	<b>73%</b>	<b>49,999,800</b>	
6	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan IUSP (Ijin Usaha Simpan Pinjam)</b>	<b>100%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan IUSP (Ijin Usaha Simpan Pinjam)</b>	<b>100%</b>	<b>49,999,800</b>	
15)	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	100 Unit usaha	50,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	100 Unit usaha	49,999,800	

III	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</b>	<b>56.36%</b>	<b>530,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</b>	<b>56.36%</b>	<b>510,014,500</b>	
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	100%	530,000,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	100%	510,014,500	
16)	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	165 Unit Usaha	420,000,000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	165 Unit Usaha	382,874,500	
17)	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	165 Unit Usaha	110,000,000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam	78 koperasi	127,140,000	
IV	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		<b>Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi</b>	<b>25%</b>	<b>225,000,000</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi</b>	<b>17%</b>	<b>256,386,600</b>	
8	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang dinilai tingkat kesehatan KSP USP	100%	225,000,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai tingkat kesehatan KSP USP	100%	256,386,600	
18)	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	115 Unit Usaha	200,000,000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang nilai tingkat kesehatan KSP USP	110 koperasi	216,289,600	
19)	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	5 Unit Usaha	25,000,000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberi penghargaan	5 koperasi	40,097,000	
V	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Presentase peserta pelatihan</b>	<b>75.76%</b>	<b>685,000,000</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Presentase peserta pelatihan</b>	<b>75.76%</b>	<b>685,000,000</b>	
9	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengurus pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi	49.09%	685,000,000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurus pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi	49.09%	685,000,000	
20)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1875 Orang	685,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1875 Orang	685,000,000	
VI	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>Persentase koperasi modern</b>	<b>6.06%</b>	<b>2,028,000,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi modern</b>	<b>6.06%</b>	<b>1,824,324,000</b>	
10	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	100%	2,028,000,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan	100%	1,824,324,000	



21)	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit usaha yang Produktif, bernilai tamba, memiliki akses pasar, Akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan	165 unit	2,028,000,000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit usaha yang Produktif, bernilai tamba, memiliki akses pasar, Akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan	165 unit	1,824,324,000	
VII	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase wirausaha baru</b>	<b>75.96%</b>	<b>10,200,000,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase wirausaha baru</b>	<b>75.96%</b>	<b>11,493,207,950</b>	
11	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Persentase jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>10,200,000,000</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Persentase jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>11,493,207,950</b>	
22)	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	320 Unit usaha	500,000,000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	320 Unit usaha	479,575,000	
23)	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	225 Unit Usaha	200,000,000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	225 Unit Usaha	116,744,000	
24)	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha	900,000,000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha	495,495,000	
25)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2100 Unit Usaha	8,400,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2100 Unit Usaha	10,270,902,950	
26)	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	275 Orang	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	275 Orang	130,491,000	
VIII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet</b>	<b>11.29%</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet</b>	<b>11.29%</b>	<b>8,706,626,200</b>	
12	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase UMKM yang terbina</b>	<b>20%</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase UMKM yang terbina</b>	<b>20%</b>	<b>8,706,626,200</b>	
27)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1000 Unit usaha	10,000,000,000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1000 Unit usaha	8,706,626,200	



## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional pada Renstra dan Renja K/L serta Renstra dan Renja Provinsi dalam hal ini adalah Renstra Renja Kementerian Koperasi dan UKM, Renstra Renja DKUK Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra dan Renja DKUM Kota Depok terhadap sasaran Renstra Renja Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Renja DKUK Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil telaahan terhadap Renstra Renja Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Renja DKUK Provinsi Jabar, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan DKUM Kota Depok yang akan ditangani pada Renstra Renja DKUM Kota Depok periode berikutnya. Hasil telaahan terhadap Renstra Renja Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Renja DKUK Provinsi Jabar bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Renja DKUM Kota Depok.

Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Renja DKUM Kota Depok dengan Renstra Renja Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Renja DKUK Provinsi Jabar serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun keterkaitan Renstra Renja Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Renja DKUK Provinsi Jabar yang terkait dengan Renstra Renja DKUM Kota Depok, diantaranya adalah dapat dilihat pada pernyataan visi dan misi masing-masing Renstra tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Komparasi Visi dan Misi Renstra Renja DKUM Kota Depok  
terhadap Visi dan Misi Renstra Renja OPD Provinsi dan Renstra Renja Kementerian

No	Visi dan Misi DKUM Kota Depok	Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	Visi dan Misi Kemekopukm
1. VISI	DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA	Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi	Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing &

			berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional & kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi & keterpaduan
2. MISI	<p>a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan</p> <p>b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif</p> <p>c. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga</p> <p>d. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing</p> <p>e. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan</p>	<p>a. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertakwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban</p> <p>b. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif</p> <p>c. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah</p> <p>d. Meningkatkan Produktivitas dan</p>	<p>a. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomik Domestik</p>

	nyaman	Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan AdilMelalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	
--	--------	--	--

### 3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu antara Tahun 2021 – 2026. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis yang ada, maka tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan.
2. Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel.
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro

Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Nilai Evaluasi AKIP PD.

Sasaran kedua meningkatnya daya saing koperasi dan usaa mikro mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Koperasi Berkualitas; dan
2. Persentase wirausaha.



Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN			CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN		
		URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	1. Nilai Evaluasi AKIP	70,20	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui Pemanfaatan teknologi informasi dan megembangkan kebijakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2.	Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing	1. Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro	1. Koperasi Berkualitas	21%	Meningkatkan tata kelola koperasi	Peningkatan manajemen koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
							Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
							Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
							Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			2. Persentase wirausaha	2.00%	Meningkatkan kapasitas usaha mikro	Penciptaan wirausaha baru dan usaha mikro naik omset	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
						Program Pengembangan Umkm	





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disusun sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok telah menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok terdiri dari 8 Program dengan 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja ini bersifat indikatif dan tentative, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana kerja ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Rumusan program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 selengkapnya disajikan pada tabel



**TABEL 4.1**  
**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P-RENJA) TAHUN 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.17.	<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
2.17.0.00.0.00.17.	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>			33,462,304,424			31,783,349,788		(1,678,954,636)	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda;</b>	100%	9,742,688,724		100%	9,182,270,588		(560,418,136)	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu</b>	100%	97,525,500		100%	126,613,500		29,088,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	52,527,500	Kota Depok	2 Dokumen	52,527,500	Kota Depok	0	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	44,998,000	Kota Depok	19 Laporan	74,086,000	Kota Depok	29,088,000	Penambahan untuk revisi Renstra
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan tepat waktu</b>	100%	7,929,570,224		100%	7,347,064,088		(582,506,136)	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	7,929,570,224	Kota Depok	34 Orang/ bulan	7,347,064,088	Kota Depok	(582,506,136)	Pengurangan gaji pokok tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran</b>	100%	1,108,445,000		100%	1,108,445,000		0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	18,165,000	Kota Depok	1 Paket	18,165,000	Kota Depok	0	

	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	412,372,000	Kota Depok	5 Paket	412,372,000	Kota Depok	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	50,000,000	Kota Depok	1 Paket	50,000,000	Kota Depok	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	206,442,000	Kota Depok	2 Paket	206,442,000	Kota Depok	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	124,385,000	Kota Depok	1 Paket	124,385,000	Kota Depok	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	453 Laporan	297,081,000	Kota Depok	453 Laporan	297,081,000	Kota Depok	0	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>414,642,000</b>		<b>100%</b>	<b>414,642,000</b>		<b>0</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6 Laporan	137,770,000	Kota Depok	6 Laporan	137,770,000	Kota Depok	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	276,872,000	Kota Depok	6 Laporan	276,872,000	Kota Depok	0	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>192,506,000</b>		<b>100%</b>	<b>185,506,000</b>		<b>(7,000,000)</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	101,960,000	Kota Depok	10 unit	94,960,000	Kota Depok	(7,000,000)	Pengurangan pajak dan asuransi kendaraan
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	40,546,000	Kota Depok	11 unit	40,546,000	Kota Depok	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50,000,000	Kota Depok	1 unit	50,000,000	Kota Depok	0	
	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Usaha simpan pinjam</b>	<b>73.48%</b>	<b>49,999,800</b>		<b>73.48%</b>	<b>0</b>		<b>(49,999,800)</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan IUSP (Ijin Usaha Simpan Pinjam)</b>	<b>100%</b>	<b>49,999,800</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>		<b>(49,999,800)</b>	

	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	49,999,800	Kota Depok	0 Unit Usaha	0	Kota Depok	(49,999,800)	Adanya moratorium SK Menteri Koperasi dan UKM dan revisi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka sub kegiatan tidak dilaksanakan/di drop
	<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Presentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</b>	<b>56.36%</b>	<b>443,312,500</b>		<b>56.36%</b>	<b>443,312,500</b>		<b>0</b>	
	<b>Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa</b>	<b>100%</b>	<b>443,312,500</b>		<b>100%</b>	<b>443,312,500</b>		<b>0</b>	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	165 Unit Usaha	349,874,500	Kota Depok	165 Unit Usaha	349,874,500	Kota Depok	0	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	165 Unit Usaha	93,438,000	Kota Depok	165 Unit Usaha	93,438,000	Kota Depok	0	
	<b>Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi</b>	<b>Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi KSP USP</b>	<b>25%</b>	<b>236,836,600</b>		<b>25%</b>	<b>236,836,600</b>		<b>0</b>	
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi KSP USP</b>	<b>100%</b>	<b>236,836,600</b>		<b>100%</b>	<b>236,836,600</b>		<b>0</b>	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	115 Unit Usaha	196,739,600	Kota Depok	115 Unit Usaha	196,739,600	Kota Depok	0	
	Penghargaan Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	5 Unit Usaha	40,097,000	Kota Depok	5 Unit Usaha	40,097,000	Kota Depok	0	
	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Persentase koperasi yang dilatih</b>	<b>75.76%</b>	<b>496,543,650</b>		<b>75.76%</b>	<b>546,543,450</b>		<b>49,999,800</b>	
	<b>Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi</b>	<b>49.09%</b>	<b>496,543,650</b>		<b>49.09%</b>	<b>546,543,450</b>		<b>49,999,800</b>	

	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	1875 Orang	496,543,650	Kota Depok	1875 Orang	546,543,450	Kota Depok	49,999,800	Penambahan Pelatihan penyusunan RAT bagi 25 Koperasi
	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Persentase koperasi modern</b>	<b>6.06%</b>	<b>1,761,339,000</b>		<b>6.06%</b>	<b>1,761,339,000</b>		<b>0</b>	
	<b>Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>1,761,339,000</b>		<b>100%</b>	<b>1,761,339,000</b>		<b>0</b>	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	165 Unit Usaha	1,761,339,000	Kota Depok	165 Unit Usaha	1,761,339,000	Kota Depok	0	
	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)</b>	<b>Persentase wirausaha baru</b>	<b>76.22%</b>	<b>11,542,957,950</b>		<b>76.22%</b>	<b>11,226,487,950</b>		<b>(316,470,000)</b>	
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Persentase Jumlah Wirausaha Baru dan Pengusaha Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>11,542,957,950</b>		<b>100%</b>	<b>11,226,487,950</b>		<b>(316,470,000)</b>	
	Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	320 Unit Usaha	479,575,000	Kota Depok	320 Unit Usaha	479,575,000	Kota Depok	0	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	225 Unit Usaha	116,744,000	Kota Depok	225 Unit Usaha	116,744,000	Kota Depok	0	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan	300 Unit Usaha	495,495,000	Kota Depok	300 Unit Usaha	495,495,000	Kota Depok	0	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	2100 Unit Usaha	10,320,652,950	Kota Depok	2100 Unit Usaha	10,004,182,950	Kota Depok	(316,470,000)	Pengurangan Jam Narasumber Eselon III atau yang disetarakan pada Pelatihan WUB, Perempuan Pengusaha dan StartUp serta Pengurangan Jumlah bulan Honorarium Pendamping dari 7 bulan menjadi 6 bulan
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dan pemberdayaan usaha mikro	275 Orang	130,491,000	Kota Depok	275 Orang	130,491,000	Kota Depok	0	

	<b>Program Pengembangan Umkm</b>	<b>Persentase usaha mikro binaan yang naik omzet</b>	<b>11.29%</b>	<b>9,188,626,200</b>		<b>11.29%</b>	<b>8,386,559,700</b>		<b>(802,066,500)</b>	
	<b>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase UMKM yang terbina</b>	<b>20%</b>	<b>9,188,626,200</b>		<b>20%</b>	<b>8,386,559,700</b>		<b>(802,066,500)</b>	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sdm, Serta Desain Dan Teknologi	Jumlah usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	1000 Unit Usaha	9,188,626,200	Kota Depok	1000 Unit Usaha	8,386,559,700	Kota Depok	(802,066,500)	Pengurangan Bantuan subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sdm, Serta Desain Dan Teknologi





## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2023 merupakan bagian dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok untuk mencapai sasaran dan tujuannya dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada sebagai masukan (input) serta menghasilkan keluaran dalam bentuk produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan laporan kinerja. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Depok dalam rangka merencanakan pembangunan dan perekonomian daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Depok, Juli 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA DEPOK**



**DEDE HIDAYAT, SE, M.Si**  
**NIP. 19730319 200212 1 006**